

RINGKASAN

Dita Anggreny, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Analisis Kebijakan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli (Studi Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022), Komisi Pembimbing, Ketua Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum. dan Anggota Dr. Sri Wahyu Handayani, S.H., M.H.

Tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang sangat dicari oleh manusia pada masa pembangunan saat ini. Kepastian hukum dibidang pertanahan, dapat ditempuh melalui pendaftaran tanah sebagai suatu proses yang diakhiri dengan penerbitan sertipikat atas nama pemilik sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan hak. Hubungan tujuan pendaftaran tanah, pencatatan perubahan data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya memerlukan peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Fenomena Kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini masuk sebagai syarat untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual beli berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Poin 17.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis analisis kebijakan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dan implikasi hukum Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 Poin 17 pada pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian bahwa kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Poin 17 terkait syarat kepesertaan BPJS Kesehatan pada pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli, berdasarkan tolak ukur asas umum pemerintahan yang baik, Instruksi presiden tersebut bertentangan dengan asas kesewenang-wenangan, asas penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir*, asas kepastian hukum, dan dapat dikatakan cacat substansi karena syarat Kartu BPJS Kesehatan tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap proses dalam peralihan hak atas tanah karena jual beli. Implikasi hukum atas kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Poin 17, terhadap PPAT tidak berimplikasi hukum apapun dan hanya menimbulkan hambatan secara prosedural terhadap PPAT yang akan melaksanakan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli, berdasarkan pasal 40 ayat 1 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar meskipun penyerahan akta jual beli tanah ke Kantor Pertanahan tidak ada satu ketentuan hukum pun yang menyatakan bahwa dengan keterlambatan penyerahan akta jual beli tanah tersebut menjadikan akta yang bersangkutan tidak sah.

Kata kunci ; PPAT, BPJS Kesehatan, Jual Beli, Tanah.

SUMMARY

DITA ANGGRENY, Master of Notary Study Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Analysis of National Health Insurance Program Participation Policy in Registration of Transfer of Land Rights Due to Sale and Purchase (Study of Presidential Instruction No. 1 of 2022), Advisory Commission, Chair Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum. and Member Dr. Sri Wahyu Handayani, S.H., M.H.

Land is a commodity and production factor that is highly sought after by humans during the current development period. Legal certainty in the field of land can be achieved through land registration as a process that ends with the issuance of a certificate in the name of the owner as proof of ownership or control of rights. The relationship between the purpose of land registration, the recording of changes in juridical data that have been previously recorded requires the role of the Land Deed Making Officer. The phenomenon of BPJS Kesehatan participation is currently included as a condition for registering the transfer of land rights through buying and selling based on Presidential Instruction Number 01 of 2022 concerning Optimization of the Implementation of the National Health Insurance Program, point 17.

The purpose of this research is to analyze the policy analysis of the participation of the national health insurance program in the registration of transfer of land rights due to sale and purchase and the legal implications of Presidential Instruction No. 1 of 2022 Point 17 on the registration of transfer of land rights due to sale and purchase of Land Deed Officials. The method used in this study is a normative juridical method analyzed normatively qualitatively.

*The results of the research are that the policy of Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning Optimizing the Implementation of the National Health Insurance Program (JKN) Point 17 is related to the requirements for BPJS Health participation in registering the transfer of land rights due to buying and selling, based on the general principles of good governance, the president's instructions are contradictory with the principle of arbitrariness, the principle of abuse of authority or *détournement de pouvoir*, the principle of legal certainty, and can be said to be defective in substance because the conditions for the BPJS Health Card do not have a direct relationship to the process of transferring land rights due to sale and purchase. The legal implications of Presidential Instruction No. 1 of 2022 Point 17 for PPATs do not have any legal implications and only cause procedural obstacles to PPATs who will carry out the registration of transfer of land rights due to sale and purchase, based on article 40 paragraph 1 no later than 7 (seven)) working days from the date of signing of the deed in question, the PPAT is obliged to submit the deed he made along with the relevant documents to the Land Office to be registered even though the handover of the deed of sale and purchase of land to the Land Office does not contain a single legal provision stating that with a delay in the delivery of the deed of sale Buying the land makes the deed in question invalid.*

Keywords ; PPAT, Health BPJS, Sale and Purchase, Land.